

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	BISNIS INDONESIA	14	3-8-2002

Porsi saham KPC bagi Kaltim tak akan diubah

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah menegaskan tidak akan mengubah pembagian komposisi saham PT Kaltim Prima Coal meskipun Pemprov Kaltim keberatan atas jatah saham yang diberikan.

Sekjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Djoko Darmono, mengemukakan bahwa sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya menghubungi Gubernur Kaltim.

"Kami memberitahukan bahwa penawaran sudah resmi dilakukan pada tanggal 31 Juli. Namun demikian perlu dilihat juga bahwa Pak Menteri saat masih berada di MPR untuk mengikuti sidang tahunan," tuturnya di Jakarta kemarin.

Menurut dia, ancaman pemprov Kaltim untuk menghentikan kegiatan operasional tersebut akan merugikan daerah juga.

Dia mengatakan permintaan mayoritas saham tersebut sah saja dilakukan, tetapi jika kemudian terjadi penghentian produksi maka akan berakibat tidak masuknya dividen dan royalti. Jadi,

lanjutnya, tidak hanya pemerintah pusat saja yang merugi tapi pemerintah daerah juga.

Sebelumnya deputy director external relations [pemegang saham PT KPC] Anang Rizkani Noor, mengatakan dimungkinkan terjadinya penghentian kegiatan produksi oleh DPRD Kaltim. "Jika hal tersebut terjadi, maka kami akan mengkonsultasikannya kepada pemerintah pusat," tuturnya.

Menurut dia, sudah menjadi kewajiban dan hak KPC untuk menjalankan produksi, namun jika kenyataan yang terjadi di lapangan terjadi penghentian kegiatan operasional, masalah tersebut menjadi urusan pemerintah dan aparat.

Djoko mengatakan selama Indonesia masih menjadi negara kesatuan maka pemerintah provinsi dan pemerintah pusat adalah satu.

Dia menjelaskan dalam tiga bulan masa penawaran dan *due dilligence* terbuka kemungkinan terjadi perubahan. Yang pasti, lanjutnya, pemerintah nantinya yang akan memutuskan siapa pembelinya. (04)